



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
PERTEMUAN WAKIL KETUA DPR RI/KORKESRA
DENGAN
KONSTITUEN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Tahun Sidang : 2021-2022
Masa Persidangan : I
Jenis Rapat : Pertemuan
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Senin, 10 Agustus 2021
Waktu : 13.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Lapangan Desa Jl. Sumbawa No.6 Prapen Praya Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Acara : Gus Muhaimin Mendegar Konstituen Provinsi Nusa Tenggara Barat
Ketua : Dr. H. A. Muhaimin Iskandar, M.SI, Wakil Ketua DPR RI/Korkesra
Sekretaris Rapat : Susantomo S.I.P M.AP.
Hadir : **1. Pimpinan**
- Dr. H. A. Muhaimin Iskandar, M.SI
2. Narasumber
- Lalu Hardian Irfan
- Budi Nurdiansyah
3. Peserta Offline
- Baiq Mulyanah
- Husna Fatayati
- Erwandi
- Ahmad Sanusi
- Guru TOI Akhdiansyah
- Lalu Mustanadi
- H. Mustahid
- Lalu Pelita Putra
4. Staf Khusus dan Tenaga Ahli Watua DPR RI/Korkesra
5. Staff

I. PENDAHULUAN

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tentang Tata Tertib.
3. Bahwa Anggota Dewan adalah pejabat *elected* sebagai pemegang amanah suara rakyat, wajib melakukan agregasi dan artikulasi terhadap kehendak dan aspirasi rakyat.
4. Bahwa Anggota DPR RI wajib memperjuangkan program pembangunan untuk daerah pemilihan.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

Pertemuan Wakil Ketua DPR RI dengan Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat dilakukan secara Hybrid (Virtual dan offline) dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah anggota DPRD Provinsi NTB, anggota DPRD Kabupaten/Kota se NTB, sejumlah Lurah dan Kepala Desa di Lombok Tengah, Komisioner KPID NTB, Husna Fatayati, serta Rektor UNU NTB, Baiq Mulyanah.

Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) mengawali rangkaian roadshow politik kesejahteraan dengan melakukan pertemuan secara virtual bersama masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB).

Sebetulnya acara ini saya harus datang ke NTB, kita tunda-tunda terus nunggu pandemi agak mereda, tapi tidak kunjung mereda, sehingga acara ini kita lanjutkan saja secara hybrid (virtual dan Offline) virtual tapi tidak mengurangi khidmad silaturahmi.

Menurut Wakil Ketua DPR RI/Korkesra, roadshow politik kesejahteraan bukan hanya menjadi kekuatan berfikir mengatasi masalah, tapi bersama-sama merencanakan dan mencari solusi tantangan kehidupan bangsa dengan lebih baik. Roadshow politik kesejahteraan ini bagian dari rangkaian tulisan buku saya yang sudah dilaunching tahun lalu. Kita terus minta masukan dari pakar, guru besar, jurnalis, aktivis, intelektual, alim ulama, agar rancangan masa depan politik kesejahteraan ini terwujud dengan cepat.

Wakil Ketua DPR RI/Korkesra ini mengakui realitas bangsa Indonesia yang beragam. Kultur keagamaan yang kuat, solidaritas yang tinggi, tapi juga ada realitas yang jomplang di sisi pendidikan, termasuk dalam masalah ekonomi. Karena itu, dia ingin mendengar secara langsung bagaimana realita di NTB secara langsung. Dalam roadshow politik kesejahteraan ini saya ingin mendengarkan laporan bagaimana yg terjadi di sana, kondisi terkini di NTB, baik dari tokoh masyarakat, sahabat-sahabat aktivis, dan lainnya.

Tanggapan/Masukan Masyarakat NTB

Kepala Desa Lantang, Lombok Tengah, Erwandi, meminta Wakil Ketua DPR RI/Korkesra untuk memperhatikan masalah kelangkaan pupuk. Menurut Erwandi, kelangkaan pupuk menambah beban masyarakat desa yang mayoritas di antaranya adalah petani di tengah Pandemi. Penduduk desa kami mayoritas petani. Mereka mengalami kesulitan mengakses pupuk di tingkat desa dan kabupaten. Kami juga melihat KWT (Kelompok Wanita Tani) masyarakat kami juga bagian dari KWT mengalami kendala signifikan dalam produksinya. Sehingga kami memerlukan pembinaan dan support permodalan. Keluarga Pascasarjana Kabupaten Loteng, Ahmad Sanusi mengamini pernyataan Gus Muhaimin terkait terpuruknya Pariwisata di NTB, meski Mandalika masuk super prioritas. Jadi, tahun 2018 NTB diguncang gempa, sekarang Pandemi. Tercatat 15 ribu pekerja pariwisata dirumahkan akibat pandemi. saya ingin masukan dari Wakil Ketua DPR RI/Korkesra bagaimana caranya agar pariwisata di NTB kembali bangkit.

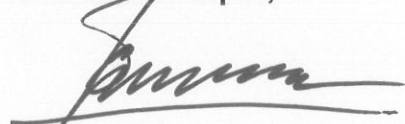
Tanggapan Wakil Ketua DPR RI/Korkesra

Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Ketua DPR RI/Korkesra menyatakan memang perlu perubahan cara kerja pertanian di Indonesia. Masalah kelangkaan pupuk juga menunjukkan fakta bahwa subsidi, distribusi dan pelaku hilir dan hulu pertanian harus dievaluasi, termasuk juga pengawasan. Kami sudah beberapa kali meminta Kementerian Pertanian dan pihak terkait membahas persoalan kelangkaan pupuk. Kadang-kadang pupuk banyak tapi distribusinya tidak tepat. Ini agenda serius kami, dan akan kami sampaikan melalui Presiden untuk mengatasi kelangkaan pupuk ini. Soal pariwisata, Wakil Ketua DPR RI/Korkesra menyatakan sudah memanggil Menteri Pariwisata dan meminta cara kerja baru menangani pariwisata. Menurut dia dibanding pariwisata ditutup, lebih baik proses saja diperketat. Jadi kami sampaikan dibanding pariwisata ditutup, lebih baik tetap dibuka tapi dengan protokol kesehatan yang ketat. Lalu jaga mobilitas orang, dan vaksinasi dipercepat. Dan tak kalah penting utamakan wisatawan lokal.

III. PENUTUP

Pertemuan ditutup Pukul 14.15 WIB

**A.n. Ketua Rapat
Sekretaris Rapat,**



Susantomo, S.I.P. M.AP.